**Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025)**
**Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan)**
**https://jhlg.rewangrencang.com/**

# REKONSTRUKSI HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA: TANTANGAN GLOBALISASI TERHADAP PRINSIP OTONOMI DAN KEDAULATAN NASIONAL

## *RECONSTRUCTION OF LOCAL GOVERNMENT LAW IN INDONESIA: THE CHALLENGE OF GLOBALIZATION TOWARDS THE PRINCIPLES OF AUTONOMY AND NATIONAL SOVEREIGNTY*

**I Wayan Suarsana, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi dan Putu Eka Trisna Dewi**

**Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Ngurah Rai**

Korespondensi Penulis : wayansuarsanabalok@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Suarsana, I Wayan, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi dan Putu Eka Trisna Dewi. *Rekonstruksi Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Tantangan Globalisasi terhadap Prinsip Otonomi dan Kedaulatan Nasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

## ABSTRAK

Perubahan tatanan global dan meningkatnya interaksi antarnegara menuntut sistem pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika globalisasi tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan nasional. Dalam konteks tersebut, kajian terhadap hukum pemerintahan daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tetap sejalan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi peran otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di era globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan hukum pemerintahan daerah telah sesuai dengan sistem tata negara Indonesia di era globalisasi. Manifestasi nyata terlihat dalam penerapan prinsip demokrasi dan otonomi melalui desentralisasi pemerintahan daerah, meskipun tanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada pada pemerintah pusat. Penguatan hukum pemerintahan daerah diperlukan untuk mendorong kemandirian, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat daerah. Kebaruan studi ini terletak pada analisis komprehensifnya tentang bagaimana globalisasi menantang kerangka tata kelola daerah Indonesia, yang menekankan perlunya memperkuat hukum pemerintahan daerah guna meningkatkan kemandirian, akuntabilitas, dan kesejahteraan publik. Temuan ini menyiratkan bahwa reformasi hukum di tingkat daerah sangat penting untuk menyeimbangkan otonomi daerah dengan integrasi nasional dalam menghadapi tekanan global.

**Kata Kunci : Hukum Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah, Desentralisasi, Ketatanegaraan**

***ABSTRACT***

*The changing global order and the growing interaction among nations demand a governance system capable of adapting to globalization dynamics without neglecting the principle of national sovereignty. In this context, examining regional government law becomes crucial to ensure that the implementation of regional autonomy remains consistent with Indonesia's constitutional framework. This study aims to identify the role of regional autonomy in the governance system amid globalization. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The data consist of secondary sources, including legislation, books, academic journals, and other relevant official documents. The results show that the implementation of regional government law aligns with Indonesia's constitutional system in the globalization era. The manifestation of democratic and autonomy principles is evident through the decentralization of local governance, although the central government retains the main responsibility for regional administration. The novelty of this study lies in its comprehensive analysis of how globalization challenges Indonesia's regional governance framework, emphasizing the need to strengthen regional government law to enhance independence, accountability, and public welfare. The findings imply that legal reform at the regional level is essential to balance local autonomy with national integration in facing global pressures.*

**Keywords:** ***Regional Government Law, Regional Autonomy, Decentralization, Constitutional Law***

## A. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah memiliki peran strategis sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat lokal, pemerintahan daerah berfungsi untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat pelaksanaan prinsip demokrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks ketatanegaraan, keberadaan pemerintahan daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[1] Landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat dalam Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak daerah untuk mengatur kepentingannya sendiri tersebut berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya, kekhususan, serta pengakuan terhadap keberagaman masyarakat hukum adat.

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan daerah tidak hanya berorientasi pada efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan kemandirian daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Perjalanan politik hukum pemerintahan daerah di Indonesia mengalami dinamika yang cukup panjang dan kompleks. Sejak masa Orde Lama hingga Orde Baru, implementasi otonomi daerah cenderung bersifat sentralistik, di mana peran dan kewenangan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan pemerintah daerah. Sentralisasi ini dianggap perlu untuk menjaga stabilitas politik dan keutuhan negara, tetapi dalam praktiknya sering menimbulkan kesenjangan antara pusat dan daerah. Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik penting yang menandai perubahan paradigma pemerintahan. Desakan masyarakat terhadap reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan mendorong dilakukan amandemen UUD 1945 dan lahirnya regulasi baru yang memperkuat otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian menjadi tonggak awal desentralisasi yang lebih luas, disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[2] Undang-undang ini menegaskan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperhatikan hubungan antara pusat dan daerah, potensi lokal, serta tantangan global dalam satu sistem pemerintahan yang terpadu.

Di era globalisasi saat ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dan multidimensional. Arus globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, liberalisasi ekonomi, serta penetrasi budaya lintas negara membawa pengaruh besar terhadap sistem hukum dan tata kelola pemerintahan nasional maupun daerah. Globalisasi mendorong perubahan pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat, menuntut transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kapasitas kelembagaan daerah untuk bersaing di tingkat global. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan nasional, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah kompetisi global.

[2] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun, di sisi lain, globalisasi juga menimbulkan tantangan terhadap eksistensi prinsip kedaulatan dan otonomi daerah, karena adanya tekanan harmonisasi hukum dan standar tata kelola global yang kadang tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik hukum nasional. Kajian mengenai pemerintahan daerah selama ini telah banyak dilakukan, baik dari perspektif hukum, administrasi publik, maupun politik. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menyoroti aspek administratif dan politik hubungan antara pusat dan daerah, sementara analisis mendalam terhadap *rekonstruksi hukum pemerintahan daerah* dalam konteks globalisasi masih terbatas.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan studi yang meninjau bagaimana hukum pemerintahan daerah dapat dikembangkan untuk menjawab tantangan global tanpa mengurangi prinsip dasar negara kesatuan dan kedaulatan nasional. Menurut Philipus M. Hadjon (2007), otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara kesatuan yang demokratis, karena memberi ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Senada dengan itu, Jimly Asshiddiqie (2017) menyatakan bahwa pemerintahan daerah memperkuat struktur ketatanegaraan dengan mendekatkan pelayanan kepada rakyat. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip otonomi daerah seringkali dihadapkan pada persoalan tumpang tindih kewenangan, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta inkonsistensi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pemerintahan daerah menunjukkan bahwasanya penerapan desentralisasi di Indonesia menghadapi kendala serius, seperti yang diungkapkan oleh Enny Nurbaningsih (2011) yang berjudul "Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah dalam Peraturan Daerah (Studi Periode Era Otonomi Seluas-Luasnya)" yaitu ketidakseimbangan antara pemberian wewenang dan kemampuan daerah dalam mengelola wewenang tersebut.[3] Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Jati, Raharjo, W. (2016) tentang Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia:

[3] E. Nurbaningsih, *Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah dalam Peraturan Daerah*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi yang membahas tentang keterkaitan prinsip-prinsip pembentukan peraturan daerah, kerangka dasar peraturan perundang-undangan, serta materi peraturan daerah dalam konteks UU Pemda 2004.[4] Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Wicaksono, Dian, A. (2015) berjudul Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah, menunjukan bahwa kebijakan publik dan hukum memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.[5] Namun, kekurangan kebijakan yang berkualitas, ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah, serta faktor politik dan administratif dapat menghambat eksistensi dan efektivitas kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan upaya konseptual dan normatif untuk menata kembali arah hukum pemerintahan daerah agar tetap relevan dengan dinamika global tanpa meninggalkan nilai dasar konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi rekonstruksi hukum pemerintahan daerah di Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi, dengan fokus pada upaya menyeimbangkan antara prinsip otonomi daerah dan kedaulatan nasional dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang demokratis.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Landasan Hukum Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan rakyat. Dalam sistem negara kesatuan seperti Indonesia, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan keniscayaan agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh untuk mengatur hubungan tersebut.

---

[4] Raharjo W. Jati, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*, Jurnal Konstitusi, Vol.9, No.4 (2016).

[5] Dian A. Wicaksono, *Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.3 (2015).

Landasan hukum pemerintahan daerah mencakup konstitusi, undang-undang, hingga peraturan pelaksana yang mengatur berbagai aspek seperti otonomi, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan tata kelola administrasi. Dasar hukum pemerintahan daerah secara rinci terbagi dalam tiga bagian utama: konstitusi, undang-undang dan peraturan turunannya, serta implikasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.[6]

Landasan hukum pemerintahan daerah di Indonesia berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18, 18A, dan 18B, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, kewenangan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional yang mengatur tentang susunan dan prinsip pemerintahan daerah. Dalam pasal ini dijabarkan mengenai pembagian wilayah Indonesia ke dalam satuan-satuan pemerintahan daerah, serta prinsip dasar otonomi dan desentralisasi. Pasal ini memberikan landasan bagi terbentuknya struktur pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip negara kesatuan, namun tetap mengakomodasi keberagaman lokal dan kebutuhan efektivitas pemerintahan.

Setelah amandemen, Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

[6] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, dalam pasal 18 UUD 1945 juga menjelaskan tentang bentuk negara dan pembagian wilayah. Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Namun, dalam pelaksanaannya dibagi atas daerah-daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Pembagian ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan. Pentingnya otonomi daerah yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di luar yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah dipimpin oleh pemimpin daerah yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan kepala daerah secara serentak yakni gubernur, bupati, dan wali kota, serta memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya juga dipilih melalui pemilu. Hal ini menegaskan prinsip daerah sebagai pelaksana demokrasi lokal. Daerah memiliki hak membentuk peraturan daerah (Perda) untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ini memberi ruang bagi kearifan lokal dalam mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Seluruh ketentuan teknis mengenai susunan, pembagian, dan kewenangan pemerintahan daerah harus diatur dalam undang-undang, seperti yang kini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa Pasal 18 menegaskan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Salah satu undang-undang yang menjadi pelaksana dari ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi pedoman teknis dalam pengelolaan otonomi daerah di Indonesia. Pasal 18 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional yang penting dalam membentuk sistem pemerintahan daerah yang demokratis, otonom, dan partisipatif. Melalui pasal ini, Indonesia membangun tata kelola pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh pelosok negeri. Dalam konteks negara kesatuan, otonomi daerah yang diatur Pasal 18 tidak melemahkan integrasi nasional, tetapi justru memperkuatnya melalui pemberdayaan daerah secara menyeluruh.

Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional.

Melalui undang-undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/ lembaga pemerintahan non kementerian yang urusan

pemerintahannya didesentralisasikan ke daerah. Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, karena setiap kementerian/ lembaga pemerintahan non kementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/ lembaga non kementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota secara nasional. Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/ kelembagaan pemerintahan non kementerian dengan daerah untuk mencapai nasional.

**2. Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mengalami fluktuasi yang dinamis sejak masa reformasi 1998. Sejak masa kemerdekan negara Indonesia berada di bawah sistem pemerintahan yang terpusat, namun akhirnya sejak memasuki masa reformasi, Indonesia mengambil langkah besar menuju desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mengakomodasi keberagaman daerah yang kaya akan budaya dan sumber daya alam. Kebijakan hukum yang dirancang untuk konteks nasional tidak selalu mempertimbangkan kekhasan dan perbedaan daerah di Indonesia yang heterogen. Akibatnya, implementasi kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi daerah dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan pemerintahan daerah. Ketika kebijakan hukum pusat tidak sinkron dengan kondisi dan kebutuhan lokal, implementasi yang tidak efektif dan berkelanjutan dapat terjadi. Dalam hal ini, penting untuk memahami potensi ketidakselarasan tersebut dan bagaimana hal itu mempengaruhi pemerintahan daerah. Pelaksanaan sistem desentralisasi tidak selalu berjalan mulus. Terdapat perdebatan yang berkelanjutan seputar pembagian kekuasaan dan sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa daerah merasa bahwa mereka belum mendapatkan porsi yang adil dalam hal pendanaan pembangunan dan kewenangan pengelolaan sumber daya alam.

Ketimpangan ini kerap memicu ketegangan dan menimbulkan sentimen separatisme di wilayah tertentu, seperti yang pernah terjadi di Aceh dan Papua. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat perlu memperhatikan kekhasan dan kebutuhan daerah dalam merancang kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif. Dalam hal ini, melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perumusan kebijakan dapat meningkatkan pemahaman dan koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan

Selain itu, diperlukan juga mekanisme komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan hukum. Dialog yang terbuka dan saling mendukung antara kedua belah pihak dapat mengurangi ketidakselarasan, memfasilitasi pertukaran informasi, dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan hukum dengan lebih baik. Dalam praktik, pusat masih melakukan re-sentralisasi dalam beberapa sektor strategis (perizinan, pendidikan, energi). Secara keseluruhan, ketidakselarasan antara kebijakan hukum pusat dan implementasi di daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan pemerintahan daerah di Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik, diperlukan upaya untuk memperkuat koordinasi, partisipasi, dan pemahaman bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan hukum yang lebih responsif dan berdaya guna.

### 3. Tantangan Implementasi Hukum Pemerintahan Daerah di Era Globalisasi

Pelaksanaan hukum pemerintahan daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks di era globalisasi. Keterbukaan ekonomi dunia, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya tuntutan transparansi publik telah mengubah cara pemerintah daerah menjalankan fungsi dan kewenangannya. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan ekonomi yang menuntut adaptasi sistem hukum serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

Berikut adalah beberapa tantangan strategis yang dihadapi dalam implementasi hukum pemerintahan daerah beserta dampak dan rekomendasi solusinya.

**a. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Daerah**

Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur masih menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Dampak globalisasi: Dalam konteks global, daerah yang kekurangan kapasitas fiskal sulit bersaing dalam menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Data Kementerian Keuangan (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 60% daerah di Indonesia masih bergantung pada Dana Transfer dari Pusat (DAU dan DAK).
- Implikasi: Ketergantungan fiskal ini menimbulkan kesenjangan dalam kemampuan implementasi hukum dan kebijakan publik antar daerah.
- Rekomendasi: Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi ekonomi lokal, digitalisasi pajak daerah, serta optimalisasi aset daerah. Di sisi lain, pengembangan kapasitas aparatur sipil negara melalui *capacity building* berbasis kompetensi harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum.

**b. Kelemahan Kelembagaan dan Birokrasi**

Banyak pemerintah daerah masih menghadapi persoalan tata kelola kelembagaan yang belum efisien, termasuk lemahnya koordinasi antarinstansi dan lambatnya reformasi birokrasi.

- Dampak globalisasi: Persaingan antarnegara dan antarwilayah menuntut birokrasi yang adaptif, transparan, dan berbasis kinerja. Namun, sistem birokrasi di sejumlah daerah masih cenderung administratif dan kurang inovatif.
- Contoh kasus: Laporan Kemenpan-RB (2022) mencatat bahwa hanya 27% pemerintah daerah yang mencapai kategori “Sangat Baik” dalam indeks reformasi birokrasi nasional.

- Rekomendasi: Reformasi birokrasi daerah harus diarahkan pada penerapan *e-government* secara menyeluruh, penyederhanaan prosedur hukum dan perizinan, serta peningkatan budaya kerja berbasis hasil (*performance-based management*).

**c. Ketidaksesuaian Kebijakan Nasional dengan Kondisi Lokal**

Regulasi yang bersifat sentralistik sering kali tidak memperhatikan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya daerah.

- Dampak globalisasi: Di tengah persaingan global, daerah perlu merancang kebijakan yang responsif terhadap keunggulan lokal. Kebijakan yang "satu model untuk semua" justru dapat menghambat potensi daerah untuk berkembang.
- Contoh: Implementasi kebijakan pariwisata berbasis digital di daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur sering terhambat oleh minimnya infrastruktur dan literasi digital masyarakat.
- Rekomendasi: Diperlukan penerapan prinsip *asymmetric decentralization*, di mana daerah diberi ruang inovasi dan fleksibilitas hukum sesuai dengan kapasitas dan konteks lokalnya. Pemerintah pusat sebaiknya bertindak sebagai fasilitator, bukan pengendali utama.

**d. Lemahnya Penegakan Hukum dan Ketidakpatuhan terhadap Regulasi**

Ketidakpatuhan terhadap hukum daerah, baik oleh aparatur maupun masyarakat, sering menghambat efektivitas implementasi.

- Dampak globalisasi: Arus investasi dan perdagangan internasional menuntut kepastian hukum. Ketika daerah gagal menegakkan peraturan secara konsisten, investor global cenderung mengalihkan modalnya ke wilayah lain yang lebih stabil.
- Contoh kasus: Beberapa pemerintah daerah tercatat dalam laporan BPK (2023) memiliki tingkat pelanggaran administrasi keuangan tinggi akibat lemahnya pengawasan dan sanksi yang tidak tegas.
- Rekomendasi: Penegakan hukum harus diperkuat melalui pembentukan unit pengawasan independen di daerah, penerapan sanksi administratif yang konsisten, serta penggunaan teknologi pengawasan digital untuk mencegah korupsi dan penyimpangan.

e. **Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Hukum dan Kebijakan**

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan daerah masih terbatas.

- **Dampak globalisasi:** Di era keterbukaan informasi, partisipasi publik menjadi ukuran legitimasi pemerintahan. Daerah yang gagal melibatkan masyarakat akan kehilangan kepercayaan publik dan legitimasi sosial.
- **Contoh:** Hasil survei Kemendagri (2022) menunjukkan bahwa hanya 38% masyarakat mengetahui keberadaan peraturan daerah di wilayahnya.
- **Rekomendasi:** Pemerintah daerah perlu memperluas kanal partisipasi melalui forum konsultasi publik, *e-participation platform*, dan kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

f. **Pergantian Kepemimpinan dan Inkonsistensi Kebijakan**

Pergantian kepala daerah sering kali menyebabkan perubahan arah kebijakan yang drastis.

- Dampak globalisasi: Ketidakstabilan kebijakan daerah menurunkan kredibilitas daerah di mata investor dan mitra internasional.
- Contoh: Dalam beberapa kasus, proyek investasi yang telah disetujui oleh pemerintah sebelumnya dibatalkan oleh pemimpin baru karena perbedaan visi politik, seperti yang terjadi di beberapa daerah industri di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur.
- Rekomendasi: Perlu diterapkan mekanisme transisi kebijakan dan *continuity clause* dalam peraturan daerah agar program strategis tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepala daerah.

g. **Keterbukaan Informasi dan Transparansi**

Transparansi menjadi isu penting di era digital, di mana masyarakat menuntut keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran publik.

- Dampak globalisasi: Daerah yang tidak transparan cenderung tertinggal dalam kompetisi global karena rendahnya kepercayaan publik dan buruknya reputasi tata kelola.
- Contoh: Komisi Informasi Pusat (2023) melaporkan hanya 41% pemerintah daerah yang memenuhi kategori "Informatif" dalam keterbukaan publik.
- Rekomendasi: Penguatan *open government policy*, publikasi anggaran secara daring, serta penggunaan sistem *e-audit* akan meningkatkan akuntabilitas dan memperkecil potensi penyimpangan.

Tantangan implementasi hukum pemerintahan daerah di era globalisasi menunjukkan bahwa aspek hukum, kelembagaan, dan sosial tidak dapat dipisahkan. Penguatan otonomi daerah harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas, integritas, dan partisipasi masyarakat. Hanya dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil, prinsip pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berkeadilan dapat diwujudkan untuk menghadapi kompetisi global yang semakin ketat.

## C. PENUTUP

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi hukum pemerintahan daerah di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks di tengah arus globalisasi. Berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya kelembagaan, ketidaksesuaian kebijakan nasional dengan kondisi lokal, serta rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi penghambat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan adaptif. Globalisasi menuntut daerah tidak hanya mampu melaksanakan kewenangan secara administratif, tetapi juga mampu bersaing secara ekonomi, hukum, dan teknologi dengan tetap berlandaskan prinsip otonomi dan kedaulatan nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan upaya rekonstruksi sistem hukum pemerintahan daerah yang lebih adaptif terhadap dinamika global dan sensitif terhadap kebutuhan serta kapasitas lokal. Regulasi otonomi daerah perlu dirancang agar memberikan ruang inovasi bagi daerah, tanpa mengabaikan fungsi koordinatif pemerintah pusat. Penguatan terhadap kapasitas sumber daya manusia

dan kelembagaan daerah harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan berbasis kompetensi, peningkatan literasi digital pemerintahan, serta pembenahan sistem manajemen publik agar lebih profesional dan transparan. Di sisi lain, penegakan hukum daerah memerlukan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti e-audit dan compliance monitoring untuk memastikan akuntabilitas serta mencegah penyimpangan kewenangan. Peningkatan partisipasi publik juga menjadi elemen penting, di mana pemerintah daerah harus mendorong keterlibatan masyarakat melalui forum konsultasi terbuka dan kebijakan open government yang menjamin akses terhadap informasi publik.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, hukum pemerintahan daerah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat di tengah kompetisi global. Reformasi hukum yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada tata kelola yang baik akan menjadi landasan utama bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang berdaya saing, responsif, dan berkeadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Falaakh, Mohammad F. 2014. *Pertumbuhan dan Model Konstitusi serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, Philipus M. 2007. *Hukum Administrasi dan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nimatul, H. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Nurbaningsih, E. 2011. *Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah dalam Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

**Publikasi**

Ali, M. dan E. Julianthy. *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.15. No.2 (2018).

Aritonang, Dinoroy M.. *Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.13. No.1 (2016).

Arthanaya, I. W.. *Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Kertha Wicaksana. Vol.17. No.2 (2011).

Barlian, Aristo A.. *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan dalam Perspektif Politik Hukum*. Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.4 (2016).

Budiyono, Muhtadi dan Ade F.. *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah*. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.67. No.XVII (2015).

Dayanto. *Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah*. Jurnal Tahkim. Vol.IX. No.2 (2013).

Fakrulloh, Zudan A.. *Tertib Regulasi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.2 (2018).

Jati, Raharjo W.. *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*. Jurnal Konstitusi. Vol.9. No.4 (2016).

Wicaksono, Dian A.. *Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.3 (2015).

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.